



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2021  
NOMOR : SP DIPA- 005.04.2.402283/2021**



DS-6115-9880-8935-9281

**A. Dasar Hukum:**

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 9 Tahun 2020 tentang APBN TA 2021

**B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:**

|                               |   |          |                                                                                    |
|-------------------------------|---|----------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Kementerian Negara/Lembaga | : | (005)    | MAHKAMAH AGUNG                                                                     |
| 2. Unit Organisasi            | : | (04)     | Ditjen Badan Peradilan Agama                                                       |
| 3. Provinsi                   | : | (11)     | SUMATERA SELATAN                                                                   |
| 4. Kode/Nama Satker           | : | (402283) | PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM                                                        |
| Sebesar                       | : | Rp.      | 139.650.000 ( SERATUS TIGA PULUH SEMBILAN JUTA ENAM RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH ) |

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN  
03.04 PERADILAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

005.04.BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum  
005.04.BF.1053 Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

**C. Sumber Dana Berasal Dari :**

1. Rupiah Murni

2. PNB

PNBP TA Berjalan

3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri

- Pinjaman Luar Negeri

- Hibah Luar Negeri

Rp. 139.650.000 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri

Rp. 0 5. Hibah Dalam Negeri

Rp. 0 6. Hibah Langsung

Rp. 0 7. Hibah Luar Negeri Langsung

Rp. 0 8. Hibah Dalam Negeri Langsung

Rp. 0 9. SBN

Rp. 0 10. SPSN PBS

**D. Pencairan dana dilakukan melalui :**

1. KPPN LAHAT

**E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)**

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Jakarta, 23 November 2020  
A.N MENTERI KEUANGAN  
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN



ttd.  
ASKOLANI  
NIP. 196606111992021001



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2021  
NOMOR : SP DIPA- 005.04.2.402283/2021**



DS.6115-9880-8935-9281

**A. Dasar Hukum:**

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 9 Tahun 2020 tentang APBN TA 2021

**B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:**

1. Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
2. Unit Organisasi : (04) Ditjen Badan Peradilan Agama
3. Provinsi : (11) SUMATERA SELATAN
4. Kode/Nama Satker : (402283) PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM
- Sebesar : Rp. 139.650.000 ( SERATUS TIGA PULUH SEMBILAN JUTA ENAM RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH )

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN

03.04 PERADILAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

005.04.BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

005.04.BF.1053 Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Jumlah Uang

Rp. 139.650.000

Rp. 139.650.000

**C. Sumber Dana Berasal Dari :**

|                               |     |             |                                |     |   |
|-------------------------------|-----|-------------|--------------------------------|-----|---|
| 1. Rupiah Murni               | Rp. | 139.650.000 | 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 2. PNBP                       |     |             | - Pinjaman Dalam Negeri        | Rp. | 0 |
| PNBP TA Berjalan              | Rp. | 0           | - Hibah Dalam Negeri           | Rp. | 0 |
|                               |     |             | 5. Hibah Langsung              | Rp. | 0 |
| 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri | Rp. | 0           | - Hibah Luar Negeri Langsung   | Rp. | 0 |
| - Pinjaman Luar Negeri        | Rp. | 0           | - Hibah Dalam Negeri Langsung  | Rp. | 0 |
| - Hibah Luar Negeri           | Rp. | 0           | 6. SBSN PBS                    | Rp. | 0 |

**D. Pencairan dana dilakukan melalui :**

1. KPPN L A H A T (144) Rp. 139.650.000

**E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)**

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Jakarta, 23 November 2020  
A.N MENTERI KEUANGAN  
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.  
ASKOLANI  
NIP. 196606111992021001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**  
**NOMOR : DIPA- 005.04.2.402283/2021**  
**I A. INFORMASI KINERJA**



Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG  
Unit Organisasi : (04) Ditjen Badan Peradilan Agama  
Provinsi : (11) SUMATERA SELATAN  
Kode/Nama Satker : (402283) PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

Halaman : I A. 1

|                              |   |           |                                                                                                         |                                                                                          |      |                |             |
|------------------------------|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|-------------|
| Program                      | : | 005.04.BF | Program Penegakan dan Pelayanan Hukum                                                                   |                                                                                          |      |                | 139.650.000 |
| Kegiatan                     | : | 1053      | Peningkatan Manajemen Peradilan Agama                                                                   |                                                                                          |      |                | 139.650.000 |
| Indikator Kinerja Kegiatan   | : | 1. 01     | Jumlah naskah tata kelola di lingkungan peradilan agama yang disusun/disempurnakan                      |                                                                                          |      |                |             |
|                              |   | 2. 02     | Jumlah tenaga teknis yang mengikuti bimbingan teknis administrasi peradilan agama                       |                                                                                          |      |                |             |
|                              |   | 3. 03     | Jumlah perkara peradilan agama yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara                       |                                                                                          |      |                |             |
|                              |   | 4. 04     | Jumlah perkara peradilan agama yang diselesaikan melalui sidang di luar gedung pengadilan               |                                                                                          |      |                |             |
|                              |   | 5. 05     | Jumlah jam layanan bantuan hukum di lingkungan peradilan agama                                          |                                                                                          |      |                |             |
|                              |   | 6. 06     | Jumlah administrasi perkara jinayah di lingkungan peradilan agama yang diselesaikan                     |                                                                                          |      |                |             |
|                              |   | 7. 07     | Jumlah perkara peradilan agama yang diselesaikan melalui sidang terpadu dalam pemberian identitas hukum |                                                                                          |      |                |             |
| Klasifikasi Rincian Output 1 | : | 1053.QBA  | Layanan Bantuan Hukum Perseorangan                                                                      |                                                                                          |      | 1.315,00 Orang | 139.650.000 |
| Rincian Output               | : | 01        | QBA.001                                                                                                 | Perkara di Lingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara | (PN) | 30,00 Orang    | 14.250.000  |
|                              |   | 02        | QBA.002                                                                                                 | Perkara di Lingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui sidang di luar gedung    | (PN) | 95,00 Orang    | 50.400.000  |
|                              |   | 03        | QBA.003                                                                                                 | Layanan bantuan hukum di Lingkungan Peradilan Agama                                      | (PN) | 500,00 Orang   | 50.000.000  |
|                              |   | 04        | QBA.004                                                                                                 | Perkara di Lingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui sidang terpadu           | (PN) | 690,00 Orang   | 25.000.000  |

Jakarta, 23 November 2020  
Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama

ttd.  
Dr. Drs. Aco Nur, S.H., M.H.  
NIP 196303131989031021



DS-6115-9880-8935-9281

Halaman : I B. 1

|                                |     |             |       |                                          |      |   |     |                       |
|--------------------------------|-----|-------------|-------|------------------------------------------|------|---|-----|-----------------------|
| 1. Anggaran Tahun 2021         | Rp. | 139.650.000 | Ket : | a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing | US\$ | 0 | Rp. | 0                     |
| 1. Rupiah Murni                | Rp. | 139.650.000 |       | (2) RPLN                                 | US\$ | 0 | Rp. | 0                     |
| 2. PNBP                        | Rp. | 0           |       | b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing    | US\$ | 0 | Rp. | 0                     |
| 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri  | Rp. | 0           |       | (2) RHLN                                 | US\$ | 0 | Rp. | 0                     |
| 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0           |       | c. Pinjaman Dalam Negeri                 | IDR  | 0 |     |                       |
| 5. Hibah Langsung              | Rp. | 0           |       | d. Hibah Dalam Negeri                    | IDR  | 0 |     |                       |
| 6. SBSN PBS                    | Rp. | 0           |       | e. Hibah Luar Negeri Langsung            | IDR  | 0 |     |                       |
| 2. Rincian Pinjaman / Hibah :  |     |             |       | f. Hibah Dalam Negeri Langsung           | IDR  | 0 |     | (dalam ribuan rupiah) |

[illegible]

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**  
**NOMOR : DIPA- 005.04.2.402283/2021**  
**II. RINCIAN PENGELUARAN**



Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG  
Unit Organisasi : (04) Ditjen Badan Peradilan Agama  
Provinsi : (11) SUMATERA SELATAN  
Kode/Nama Satker : (402283) PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM  
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1  
(dalam ribuan rupiah)

| KODE      | URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA                                   | BELANJA         |                |               |                           |                   |                        | LOKASI/<br>KPPN | CARA<br>PENARIKAN/<br>REGISTER |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------|---------------------------|-------------------|------------------------|-----------------|--------------------------------|
|           |                                                                                  | PEGAWAI<br>[51] | BARANG<br>[52] | MODAL<br>[53] | BANTUAN<br>SOSIAL<br>[57] | LAIN-LAIN<br>[58] | JUMLAH<br>SELURUH<br>8 |                 |                                |
| 1         | 2                                                                                | 3               | 4              | 5             | 6                         | 7                 | 8                      | 9               | 10                             |
| 402283    | PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM                                                      | -               | 139.650        | -             | -                         | -                 | 139.650                | 11.05           |                                |
| 005.04.BF | Program Penegakan dan Pelayanan Hukum                                            | -               | 139.650        | -             | -                         | -                 | 139.650                |                 |                                |
| 1053      | Peningkatan Manajemen Peradilan Agama                                            | -               | 139.650        | -             | -                         | -                 | 139.650                |                 |                                |
| 1053.QBA  | Layanan Bantuan Hukum Perseorangan<br>(11.05 SUMATERA SELATAN / KAB. MUARA ENIM) | -               | 139.650        | -             | -                         | -                 | 139.650                |                 |                                |
| 01 RM     |                                                                                  | -               | 139.650        | -             | -                         | -                 | 139.650                | 144             |                                |
| JUMLAH    |                                                                                  | -               | 139.650        | -             | -                         | -                 | 139.650                |                 |                                |

Jakarta, 23 November 2020  
Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama

ttd.  
Dr. Drs. Aco Nur, S.H., M.H.  
NIP 196303131989031021

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2021  
NOMOR : DIPA- 005.04.2.402283/2021  
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG  
Unit Organisasi : (04) Ditjen Badan Peradilan Agama  
Provinsi : (11) SUMATERA SELATAN  
Kode/Nama Satker : (402283) PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

Halaman : III. 1  
(dalam ribuan rupiah)

| NO | KODE           | URAIAN SATKER                         | RENCANA PENARIKAN |          |        |       |        |       |       |         |           |         |          |          | JUMLAH<br>SELURUH |
|----|----------------|---------------------------------------|-------------------|----------|--------|-------|--------|-------|-------|---------|-----------|---------|----------|----------|-------------------|
|    |                |                                       | JANUARI           | FEBRUARI | MARET  | APRIL | MEI    | JUNI  | JULI  | AGUSTUS | SEPTEMBER | OKTOBER | NOVEMBER | DESEMBER |                   |
| 1  | 2              | 3                                     | 4                 | 5        | 6      | 7     | 8      | 9     | 10    | 11      | 12        | 13      | 14       | 15       | 16                |
| 1. | 402283         | PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM           |                   |          |        |       |        |       |       |         |           |         |          |          |                   |
|    |                | RENCANA PENARIKAN DANA                | 8.366             | 15.491   | 15.491 | 8.366 | 20.866 | 8.366 | 8.366 | 20.866  | 8.366     | 8.366   | 8.366    | 8.374    | 139.650           |
|    |                | BELANJA BARANG                        | 8.366             | 15.491   | 15.491 | 8.366 | 20.866 | 8.366 | 8.366 | 20.866  | 8.366     | 8.366   | 8.366    | 8.374    | 139.650           |
|    | 005.04.BF.1053 | Peningkatan Manajemen Peradilan Agama | 8.366             | 15.491   | 15.491 | 8.366 | 20.866 | 8.366 | 8.366 | 20.866  | 8.366     | 8.366   | 8.366    | 8.374    | 139.650           |
|    |                | 52 BELANJA BARANG DAN BARANG          | 8.366             | 15.491   | 15.491 | 8.366 | 20.866 | 8.366 | 8.366 | 20.866  | 8.366     | 8.366   | 8.366    | 8.374    | 139.650           |
|    |                | PERKIRAAN PENERIMAAN                  | 3.500             | 3.500    | 3.500  | 3.500 | 3.500  | 3.500 | 3.500 | 3.500   | 3.500     | 3.500   | 3.500    | 3.500    | 42.000            |
|    |                | - PNB (425233)                        | 2.000             | 2.000    | 2.000  | 2.000 | 2.000  | 2.000 | 2.000 | 2.000   | 2.000     | 2.000   | 2.000    | 2.000    | 24.000            |
|    |                | - PNB (425239)                        | 1.500             | 1.500    | 1.500  | 1.500 | 1.500  | 1.500 | 1.500 | 1.500   | 1.500     | 1.500   | 1.500    | 1.500    | 18.000            |

Jakarta, 23 November 2020  
Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama

ttd.  
Dr. Drs. Aco Nur, S.H., M.H.  
NIP 196303131989031021

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2021  
NOMOR : DIPA- 005.04.2.402283/2021  
IV A. B L O K I R



Kementerian Negara/Lembaga : [005] MAHKAMAH AGUNG  
Unit Organisasi : [04] Ditjen Badan Peradilan Agama  
Provinsi : [11] SUMATERA SELATAN  
Kode dan Nama Satker : [402283] PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

Halaman : IV.A. 1  
(dalam ribuan rupiah)

| KODE | URAIAN | KODE | URAIAN |
|------|--------|------|--------|
|      |        |      |        |

Jakarta, 23 November 2020  
Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama

ttd.  
Dr. Drs. Aco Nur, S.H., M.H.  
NIP 196303131989031021

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2021  
NOMOR : DIPA- 005.04.2.402283/2021  
IV B. C A T A T A N



Kementerian Negara/Lembaga : [005] MAHKAMAH AGUNG  
Unit Organisasi : [04] Ditjen Badan Peradilan Agama  
Provinsi : [11] SUMATERA SELATAN  
Kode dan Nama Satker : [402283] PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

Halaman : IV.B. 1  
(dalam ribuan rupiah)

| KODE | URAIAN | KODE | URAIAN |
|------|--------|------|--------|
|      |        |      |        |

Jakarta, 23 November 2020  
Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama

ttd.  
Dr. Drs. Aco Nur, S.H., M.H.  
NIP 196303131989031021